

**EVALUASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DALAM
MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN DI TAMAN FLORA
KOTA SURABAYA**

Priscila Yunita Erwanto

Program studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya
priscilayunita14@gmail.com

Anggraeny Puspaningtyas

Program studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya
anggraenypuspa@untag-sby.ac.id

Yusuf Hariyoko

Program studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya
yusufhari@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

This study evaluates the Smoke-Free Area (KTR) policy in public spaces in Surabaya City, especially in Taman Flora Bratang. The aim is to see the effectiveness of the policy in improving environmental quality. This study uses qualitative methods with interview, observation, and documentation techniques. The results show that the implementation of KTR is still not optimal due to lack of supervision and public awareness. Even so, this policy contributes positively to the cleanliness and comfort of public spaces.

Keywords: *Smoke-Free Area, Public Space, Policy Evaluation, Environment*

ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di ruang publik Kota Surabaya, khususnya di Taman Flora Bratang. Tujuannya untuk melihat efektivitas kebijakan dalam meningkatkan kualitas lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan KTR masih belum optimal karena kurangnya pengawasan dan kesadaran masyarakat. Meski begitu, kebijakan ini berkontribusi positif terhadap kebersihan dan kenyamanan ruang publik.

Kata Kunci: *Kawasan Tanpa Rokok, Ruang Publik, Evaluasi Kebijakan, Lingkungan*

A. PENDAHULUAN

Rokok merupakan produk hasil olahan tembakau yang dibungkus dalam bentuk batang atau gulungan, kemudian dibakar pada salah satu ujungnya dan dihisap pada ujung lainnya. Rokok mengandung tembakau yang dicampur dengan berbagai bahan tambahan. Saat dibakar, rokok menghasilkan asap yang mengandung zat berbahaya, seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida. Asap rokok yang dihirup ke dalam paru-paru menyebabkan zat-zat tersebut masuk ke aliran darah dan memengaruhi fungsi berbagai organ tubuh. Dampaknya terhadap kesehatan sangat signifikan, termasuk peningkatan risiko penyakit jantung, kanker paru-paru, bronkitis, serta gangguan pernapasan lainnya. Tidak hanya berbahaya bagi perokok aktif, asap rokok juga berdampak negatif pada orang di sekitarnya melalui paparan asap rokok secara tidak langsung, yang dikenal sebagai perokok pasif. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) secara umum didefinisikan sebagai area atau lingkungan tertentu yang dinyatakan bebas dari aktivitas merokok, termasuk penggunaan produk tembakau lainnya, baik dalam bentuk rokok konvensional maupun rokok elektronik. KTR bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif asap rokok, khususnya bagi perokok pasif yang tidak secara langsung mengonsumsi rokok namun tetap terpapar risikonya. Kebijakan mengenai KTR biasanya diterapkan di tempat-tempat yang memiliki kepentingan publik tinggi, seperti fasilitas pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, tempat ibadah, sarana transportasi umum, tempat kerja, dan ruang terbuka umum. Secara lebih luas, keberadaan KTR merupakan bagian dari upaya promosi kesehatan, pengendalian penyakit, serta perlindungan hak masyarakat untuk memperoleh udara bersih dan sehat. Kebijakan ini tidak hanya mengedepankan aspek kesehatan, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi, dengan harapan terciptanya lingkungan yang lebih berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kota Surabaya, sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, turut mendukung kebijakan ini dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dalam peraturan ini, beberapa lokasi ditetapkan sebagai KTR, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar-mengajar, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan ruang publik seperti taman kota. Salah satu ruang publik yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah Taman Flora Bratang, yang merupakan taman edukatif dan rekreasi bagi masyarakat Surabaya. Meskipun sudah ada regulasi dan papan peringatan tentang larangan merokok di kawasan taman, pelanggaran masih sering terjadi. Banyak pengunjung yang merokok secara bebas, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Kurangnya pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat, dan lemahnya sanksi menjadi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kebijakan ini. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas kebijakan KTR di Taman Flora Bratang dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan. Fokus evaluasi mencakup implementasi kebijakan, tantangan di lapangan, serta dampak kebijakan terhadap kebersihan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan taman. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki strategi pelaksanaan KTR di masa mendatang.

B. KAJIAN TEORITIS

Teori kebijakan publik juga menguraikan bahwa proses pembuatan kebijakan mencakup beberapa tahapan penting, yaitu identifikasi masalah, agenda setting, formulasi kebijakan, legitimasi, implementasi, serta evaluasi kebijakan. Lasswell (1956) dalam teorinya tentang the policy cycle menekankan pentingnya pendekatan sistematis dalam memahami bagaimana kebijakan publik dibuat dan dijalankan. Setiap tahap tersebut memiliki karakteristik tersendiri dan saling berkaitan, sehingga keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada konsistensi dan efektivitas di setiap tahapnya.

Tahap-tahap kebijakan

Tahap-tahap kebijakan publik dijelaskan oleh para ahli sebagai proses sistematis yang mencakup perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan untuk mengatasi masalah publik secara efektif. Anderson menyatakan bahwa kebijakan publik dimulai dengan perumusan kebijakan, yang melibatkan identifikasi masalah, analisis kondisi, dan penetapan tujuan kebijakan. Pada tahap ini, para pemangku kepentingan terlibat dalam mencari alternatif solusi dan mengkaji konsekuensi dari berbagai pilihan kebijakan.

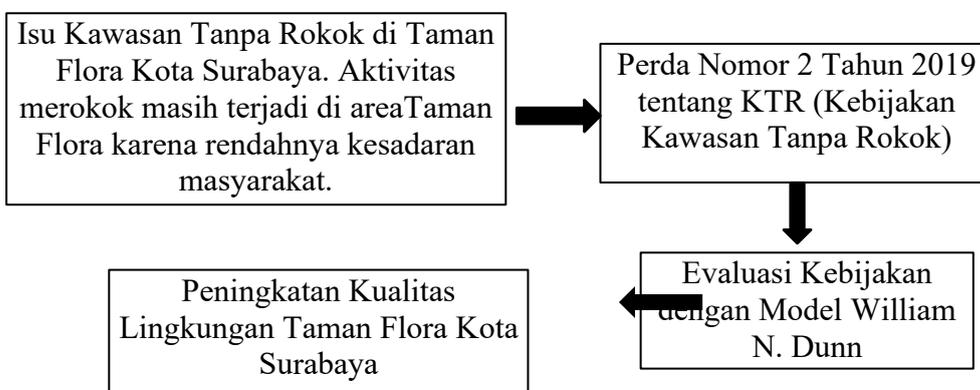
Evaluasi kebijakan publik

Evaluasi kebijakan publik merupakan proses sistematis untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi berfungsi sebagai alat untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan dampak dari kebijakan terhadap masyarakat, sekaligus memberikan dasar bagi perbaikan atau reformulasi kebijakan di masa mendatang.

Model Evaluasi Kebijakan Publik Menurut Teori William N. Dun

Teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn dalam bukunya *Public Policy Analysis* (1981) merupakan salah satu kerangka kerja yang komprehensif untuk menganalisis, merumuskan, dan mengevaluasi kebijakan publik. Dalam teori ini, Dunn menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan adalah proses sistematis untuk mengukur sejauh mana suatu kebijakan publik efektif dalam mencapai tujuannya, serta bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi masyarakat secara keseluruhan

Kerangka Konseptual



C. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan karakteristik objek yang diteliti. Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di ruang publik, khususnya di Taman Flora Bratang Kota Surabaya. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan di lapangan, termasuk hambatan, dukungan, serta tanggapan masyarakat terhadap kebijakan KTR. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali data dari berbagai sumber secara mendalam melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga menghasilkan temuan yang lebih kontekstual dan komprehensif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di ruang publik Kota Surabaya, khususnya di Taman Flora Bratang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi kebijakan tersebut, dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan KTR berdampak terhadap peningkatan kualitas lingkungan, baik dari aspek kebersihan, kenyamanan, maupun kesehatan masyarakat di ruang publik. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konstruktif bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan KTR ke depan.

2. Objek dan lokasi penelitian

1) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Taman Flora Bratang, yang terletak di Jalan Bratang Binangun, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Taman Flora Bratang dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu ruang publik yang menjadi bagian dari implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Surabaya. Selain berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, taman ini juga merupakan tempat rekreasi dan interaksi sosial masyarakat yang cukup ramai, sehingga representatif untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan KTR di ruang publik.

2) Objek Penelitian

Taman ini dipilih karena merupakan salah satu ruang publik yang cukup ramai dikunjungi masyarakat dan telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya. Melalui objek ini, penelitian bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan KTR telah diimplementasikan, tantangan apa saja yang dihadapi di lapangan, serta bagaimana dampaknya terhadap kualitas lingkungan taman, khususnya dalam hal kebersihan, kenyamanan, dan kesehatan bagi para pengunjung.

Jenis Data dan Sumber data

Data adalah hal yang belum diproses yang harus diubah menjadi informasi, baik kuantitatif maupun kualitatif, yang menyajikan fakta. Kata-kata merupakan sumber utama data dalam penelitian kualitatif; data tambahan, termasuk dokumen, dan sumber lain, melengkapi tindakan yang tersisa. Peneliti menggunakan jenis sumber data berikut dalam penelitian ini:

Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi di lapangan dan wawancara mendalam dengan informan yang dianggap relevan, seperti petugas pengelola Taman Flora Bratang, petugas keamanan Taman Flora Bratang, serta pengunjung dan masyarakat sekitar yang terlibat atau terpengaruh oleh kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, seperti peraturan daerah tentang KTR, laporan pelaksanaan kebijakan dari instansi terkait, serta literatur pendukung lain yang relevan dengan topik penelitian. Penggunaan kedua jenis data ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai efektivitas implementasi kebijakan KTR di kedua lokasi tersebut.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang sehat, Taman Flora juga menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai bentuk dukungan terhadap upaya menjaga kualitas udara dan kesehatan pengunjung. Implementasi KTR di Taman Flora bertujuan untuk menciptakan lingkungan bebas asap rokok, karena taman ini juga sering dikunjungi oleh anak-anak, pelajar, dan keluarga. Sebagai bentuk implementasi nyata, Taman Flora juga telah memasang rambu – rambu larangan merokok di sejumlah titik area taman. Dari pelaksanaan wawancara, hasil yang didapat sebagai berikut:

Efektivitas

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Taman Flora Surabaya telah berkontribusi positif dalam menciptakan ruang publik yang ramah anak dan mengurangi aktivitas merokok, namun efektivitasnya belum maksimal karena masih ditemukan pelanggaran akibat rendahnya kesadaran masyarakat, sehingga diperlukan pengawasan lebih aktif dan tegas untuk menumbuhkan kedisiplinan serta kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan bersama.

Efisiensi

Pelaksanaan kebijakan KTR di Taman Flora Surabaya telah memanfaatkan sumber daya secara optimal melalui imbauan audio, rambu larangan, dan teguran langsung yang efisien, namun masih terhambat oleh sistem pelaporan manual yang kurang responsif, sehingga dibutuhkan digitalisasi dan pelatihan petugas agar pelaporan lebih cepat, praktis, serta mendukung efektivitas penegakan kebijakan secara real-time.

Kecukupan

Kebijakan KTR di Taman Flora Surabaya telah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan lingkungan sehat dengan dukungan anggaran, fasilitas memadai, dan dampak positif terhadap kualitas udara, namun efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan jumlah petugas, ketiadaan sanksi hukum bagi pelanggar, dan belum tersedianya ruang khusus merokok, sehingga diperlukan penambahan sumber daya manusia, penguatan regulasi penegakan hukum, serta penyediaan area merokok sebagai bentuk pengendalian perilaku demi meningkatkan kepatuhan dan efektivitas kebijakan.

Pemerataan

Pelaksanaan kebijakan KTR di Taman Flora sudah berjalan cukup adil dan merata, ditunjukkan dengan pengawasan yang menyeluruh dan perlakuan setara terhadap semua pengunjung tanpa membedakan latar belakang. Rambu larangan merokok juga dipasang secara konsisten di seluruh area taman. Namun, untuk meningkatkan pemerataan, perlu dilakukan pemetaan terhadap area-area yang rawan pelanggaran agar pengawasan bisa disesuaikan dengan tingkat keramaiannya. Penggunaan teknologi seperti CCTV juga dapat membantu memperluas jangkauan pengawasan secara efisien. Selain itu, penting untuk menerapkan standar operasional prosedur (SOP) yang seragam bagi seluruh petugas, agar penegakan aturan KTR dapat dilakukan secara konsisten. Semua upaya tersebut memerlukan dukungan anggaran, karena tanpa alokasi dana yang cukup, pelaksanaan kebijakan ini berisiko tidak berjalan optimal di seluruh area taman.

Responsivitas

Kebijakan KTR di Taman Flora sudah menunjukkan responsivitas melalui mekanisme pelaporan langsung dan keterbukaan petugas terhadap kritik pengunjung, yang ditanggapi secara persuasif dan profesional, mencerminkan kemampuan pelaksana kebijakan dalam menyesuaikan tindakan berdasarkan kebutuhan masyarakat; namun agar responsivitas ini lebih kuat, perlu adanya sistem komunikasi dua arah yang lebih terbuka dan terstruktur, sehingga pengunjung tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga terlibat aktif dalam proses evaluasi dan pengawasan, sesuai dengan pentingnya komunikasi yang efektif dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan public.

Ketepatan

Kebijakan KTR di Taman Flora dinilai tepat sasaran karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi sosial-budaya, terutama karena taman ini banyak dikunjungi keluarga dan anak-anak, dengan area prioritas ditetapkan berdasarkan observasi langsung. Meski pendekatannya belum berbasis data ilmiah, strategi ini sudah menasar titik strategis. Sosialisasi dan edukasi sudah dilakukan, namun belum merata, sehingga perlu diperkuat melalui media digital dan teknologi informasi. Agar lebih efektif, pesan KTR harus diinternalisasi sebagai budaya kolektif, sehingga kepatuhan tumbuh secara alami dan kebijakan menjadi lebih adaptif terhadap perubahan sosial.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Taman Flora Surabaya telah berkontribusi positif dalam menciptakan ruang publik yang sehat dan ramah anak, serta meningkatkan kesadaran pengunjung terhadap bahaya asap rokok. Namun, efektivitas kebijakan belum optimal karena masih terdapat pelanggaran dan lemahnya pengawasan. Efisiensi pelaksanaan cukup baik dari segi pemanfaatan sarana, namun sistem pelaporan masih manual. Dari sisi kecukupan, terbatasnya jumlah petugas dan ketiadaan ruang merokok menjadi kendala. Pemerataan pengawasan telah berjalan adil, tetapi sistem komunikasi dan partisipasi publik dalam evaluasi masih perlu ditingkatkan. Ketepatan kebijakan relevan dengan karakteristik taman, meskipun sosialisasi belum merata dan kurang memanfaatkan media digital. Diperlukan penguatan strategi komunikasi, kolaborasi lintas sektor, serta evaluasi berkelanjutan untuk mendukung implementasi KTR secara efektif dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil evaluasi, disarankan agar peningkatan efektivitas kebijakan KTR dilakukan melalui patroli rutin dan teguran langsung oleh petugas keamanan dan Satpol PP. Efisiensi dapat ditingkatkan dengan penyediaan sistem pelaporan digital yang responsif. Dari aspek kecukupan, penambahan personel pengawas, penyediaan ruang khusus merokok, dan penyusunan sanksi administratif menjadi penting. Pemerataan pengawasan perlu didukung oleh pemasangan CCTV dan rambu digital di titik strategis. Untuk meningkatkan responsivitas, diperlukan sistem pengaduan formal dan forum koordinasi rutin antarinstansi. Ketepatan kebijakan dapat diperkuat dengan penyusunan materi edukasi yang sesuai karakteristik pengunjung serta penggunaan media informasi digital secara masif di area taman.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F., & Mohi, W. K. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*. Gorontalo: Ideas.
- Al-Hafiedz, Z. M. (2023, 12 17). *Psikolog Albert Bandura: Kondisi Psikologi Para Perokok*. Diambil kembali dari Psikolog Albert Bandura: Kondisi Psikologi Para Perokok: <https://matakita.co/2023/12/17/psikolog-albert-bandura-kondisi-psikologi-para-perokok/>
- Annisa, K. K., Salmi, U., Prakosa, S. S., & Hardjati, S. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Menurut Peraturan Daerah Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 (Studi di UPN Veteran Jawa Timur). *FUTURE ACADEMIA*, 8.
- Christanto, D., Santi, Kurnia, & Diah. (2023). Implementation level indicators of public facilities in Surabaya to smoke-free area regulation. *Public Health and Preventive Medicine Archive*, 10.
- dinkesJakrta. (2022, 05 28). *HTTS 2022: Seberapa Besar Populasi Perokok di Indonesia?* Diambil kembali dari Dinkes Jakarta: <https://dinkes.jakarta.go.id/berita/read/htts-2022-seberapa-besar-populasi-perokok-di-indonesia>